

BAB VI

BENCANA ALAM SEBAGAI PERISTIWA POLITIK: PEMBINGKAIAN DAN POLITISASI GEMPA BUMI DI LOMBOK UTARA

Pada bagian bab VI disertasi ini menjelaskan bagaimana bencana alam dipotret sebagai sebuah peristiwa politik yaitu pembingkaian dan politisasi gempa bumi yang terjadi pada masa pemulihan di Kabupaten Lombok Utara. Penjelasan pada bagian ini di bagi menjadi beberapa pokok sub diantaranya (1) Desaklarisasi Bencana: Genealogi Transformasi Makna dari Sebuah Fenomena Alam, Kebijakan Publik, Hingga Politisasi Eksistensial (2) Model Perilaku Pemilih yang Terintegrasi: Keputusan Politik Tunduk pada Irisan Keterbatasan Struktural dan Operasional (3) Retaknya Ekspektasi Publik Terhadap Petahana: Persepsi Kegagalan dan Harapan yang Tidak Terpnuhi Dalam Penanganan Bencana (4) Runtuhnya Struktur Kekuasaan Dinasti Lokal Yang Bersifat Sementara Sebagai Wujud Amuk Elektoral Sesaat. (5) Munculnya *Political Nexus* dan ekspansi komprehenship *vulnerabilty* berdasarkan integrasi struktural dan agensi.

6.1 Desaklarisasi Bencana: Genealogi Transformasi Makna dari Sebuah Fenomena Alam, Kebijakan Publik, Hingga Politisasi Eksistensial.

Studi ini menunjukkan bagaimana peristiwa gempa Bumi Lombok Utara 2018 berkembang dari hanya sekedar bencana alam menjadi sebuah isu kebijakan dan terakumulasi menjadi sebuah isu elektoral yang memiliki daya ledak yang kuat untuk menentukan kemenangan maupun kekalahan petahana pada sirkulasi kekuasaan politik lokal. Temuan menunjukkan bahwa pemulihan bencana menimbulkan beberapa isu kebijakan, terutama keterlambatan dalam rekonstruksi perumahan tahan

gempa (RTG), distribusi bantuan bencana yang tidak merata, dan narasi yang bersaing mengenai tanggung jawab pemerintah. Isu-isu ini secara konsisten diidentifikasi sebagai bentuk evaluasi publik terhadap pemerintahan yang sedang menjabat.

Konversi isu bencana menjadi isu elektoral berlangsung melalui tiga mekanisme yang saling terkait. Mekanisme pertama adalah membingkai kesenjangan pelaksanaan sebagai kegagalan petahana. Kampanye penantang secara sistematis menyajikan distribusi bantuan yang tidak merata, rekonstruksi RTG yang tidak lengkap, dan penyaluran dana pemulihan yang lambat sebagai bukti bahwa petahana gagal memerintah secara efektif. Kerangka ini efektif karena menghubungkan keluhan kebijakan abstrak dengan hasil konkret dan terlihat yang dapat diverifikasi pemilih dengan berjalan melalui lingkungan mereka sendiri. Materialitas bukti membuat pembingkai sulit dibales oleh petahana dengan argumen teknis tentang prosedur pemerintah pusat.

Mekanisme kedua adalah *atributif* tanggung jawab. Petahana berargumen bahwa pemerintah pusat mengendalikan sebagian besar pendanaan pemulihan dan oleh karena itu memikul tanggung jawab utama atas keterlambatan. Penantang berpendapat bahwa pemerintah lokal adalah wajah negara di komunitas terdampak dan tidak dapat bersembunyi di balik prosedur pemerintah pusat. Pemilih sebagian besar mendukung kerangka penantang. Mekanisme ketiga adalah debat terbuka tentang keberhasilan dan kegagalan. Kampanye ini menampilkan debat publik di mana setiap kandidat menyajikan data kemajuan rekonstruksi dan memperdebatkan interpretasi yang lain. Debat-debat ini tidak menyelesaikan pertanyaan faktual;

mereka memperkuatnya. Dengan memaksa pemilih memilih antara narasi yang bersaing, debat tersebut mengkristalkan bencana sebagai isu utama pemilihan.

Dari apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa bencana tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, hanya saja sebagian besar melihat sebagai kesempatan untuk memperoleh kemenangan, tetapi ternyata tidak berdiri sendiri, namun memerlukan sumber daya dukung lainnya, seperti alokasi anggaran yang memadai dan kematangan tata kelola. Bencana dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa politik yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian terhadap para kandidat. Bencana sebagai peristiwa politik dapat dilihat dari bagaimana respons pemerintah terhadap situasi dapat mempengaruhi citra dan legitimasi para kandidat dalam kontestasi politik. Kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dapat meningkatkan kepercayaan publik, sementara kinerja yang dianggap gagal dalam merumuskan kebijakan dapat memicu kritik dan ketidakpuasan publik terhadap petahana.

6.2 Model Perilaku Pemilih yang Terintegrasi: Keputusan Politik Tunduk pada Irisan Keterbatasan Struktural dan Operasional.

Salah satu temuan yang menarik dari disertasi ini adalah terjadinya mekanisme *local proxy attribution* dimana publik menyatukan kewenangan yang seharusnya berbeda menjadi satu kewenangan yang teratribusi secara kuat. Kewenangan teknokratis yang menjadi kendali pusat secara struktural berkaitan dengan struktur anggaran mengalami pragmentasi bias dengan kewenangan administrasi pada pemerintah lokal oleh masyarakat. Atribusi kewenangan ini akan menjadi berbahaya bagi pemerintahan petahana karena publik mengartikulasikan

bahwa kendala struktural merupakan bagian dari kendala operasional karena masyarakat tidak memisahkan dua kewenangan yang memiliki jangkaun berbeda.

Kontestasi politik elektoral berbasis pada bencana, sesungguhnya menjelaskan pendekatan klasik bahwa perilaku pemilih secara sosiologis, psikologis maupun secara pilihan rasional pemilih membuat keputusannya berdasarkan berbagai pertimbangan seperti: struktur sosial, kapasitas psikologis, kalkulasi secara rasional, kondisi operasional sampai pada lahirnya keputusan elektoral. Studi di Lombok Utara menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya sebatas peristiwa alam, tetapi mengalami transformasi menjadi interaksi sosial, isu kebijakan dan akhirnya menjadi sasaran politik elektoral.

Bencana terbukti utuh menjadi arena kontestasi kekuasaan para kandidat petahana maupun penantang untuk terus melakukan pendekatan dan tekanan baik secara kebijakan maupun gerakan-gerakan politik yang dapat mempengaruhi pemilih. Pergeseran isu bencana, isu kebijakan ke politik elektoral diikuti oleh perubahan model perilaku pemilih yang terintegrasi pada keputusan Politik dan tunduk pada Irisan keterbatasan struktural dan operasional. Keputusan politik pemilih yang berada pada irisan krisis keterbatasan struktural dan operasional dapat meruntuhkan paradoks klientalisme taktis dan penguasaan sumber daya petahana. Keunggulan komparatif raksasa yang dimiliki petahana (*Incumbency advantage*) berupa penguasaan mesin birokrasi, diskresi penyaluran bantuan sosial kemanusiaan, otoritas anggaran, penguasaan mesin birokrasi serta menjadi orang kuat lokal menjelang pilkada tidak mampu meruntuhkan dominasi kegagalan sistemik struktural dan operasional yang merupakan wujud amuk elektoral yang semakin menguat menjelang pemilihan.

6.3 Retaknya Ekspektasi Publik Terhadap Petahana: Persepsi Kegagalan dan Harapan yang Tidak Terpenuhi Dalam Penanganan Bencana.

Kekalahan petahana Najmul-Suardi menunjukkan bahwa persepsi kegagalan penanganan bencana semakin menguat di tengah kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin besar. Persepsi kegagalan pemerintah dalam penanganan bencana tidak mampu di tepis sekalipun dengan prestasi dan data yang disajikan oleh petahana. Manajemen penanganan bencana yang tidak maksimal menjadikan persepsi publik terhadap pemerintah yang dalam hal ini Adalah pasangan NADI telah gagal dalam menangani persoalan perumahan dan jaminan hidup masyarakat. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan calon JODA untuk mendapatkan keuntungan secara politik dengan menjadikan isu penanganan yang belum tuntas menjadi isu utama dan strategis sebagai media kampanye menjelang pemilihan dilakukan. Selain itu, harapan masyarakat yang tidak terpenuhi menjadi faktor kunci yang menumbangkan petahana pada kontestasi kekuasaan lokal.

Situasi darurat akan dapat menjadi arena kontestasi kekuasaan para kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kontestasi kekuasaan dapat mempengaruhi efektivitas dalam penanganan sebuah bencana, apakah dapat memperkuat elektoral atau justru dapat meningkatkan risiko dan kerugian bagi para kandidat. Idealnya penanganan bencana tidak boleh memiliki motif selain konsentrasi pada penanganan bencana dengan harapan tata kelola bencana betul-betul menyelesaikan permasalahan bagi korban bencana. Namun, demikian dalam implementasinya tata kelola bencana menjadi arena kontestasi kekuasaan oleh para kandidat.

Tata kelola krisis bencana merupakan faktor politik yang signifikan terhadap hasil pemilihan, dengan membangun isu penanganan bencana sebagai modal dalam melakukan kampanye oleh para kandidat. Sehingga dengan demikian, bencana alam tidak hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa natural namun merupakan sebuah peristiwa politik yang tidak berdiri sendiri. Kemampuan para kandidat dalam merespons isu publik menjadi faktor signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat di tengah kondisi krisis.

6.4 Runtuhnya Struktur Kekuasaan Dinasti Lokal Yang Bersifat Sementara Sebagai Wujud Amuk Elektoral Sesaat.

Kekalahan petahana NADI pada kontestasi kekuasaan lokal menunjukkan bahwa dominasi kekuatan lokal dan politik klientalisme dapat dikalahkan oleh isu bencana yang terus mengalami dinamika negatif terhadap petahana. Kegagalan struktural dan operasional dapat menciptakan efek domino kepada pemerintah daerah meskipun dominasi kewenangan berada pada pemerintah pusat terutama soal struktur anggaran, perubahan regulasi dan kebijakan. Keterbatasan kewenangan tersebut menurunkan peluang bagi petahana untuk memenangkan kontestasi, kendati hal tersebut berada di luar kedali petahana atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kendali penuh terkait dengan kebijakan dan struktur anggaran penanganan bencana yang ada di daerah. Verifikasi administrasi juga harus melalui proses birokrasi yang berlapis dari pemerintah daerah kepada pemerintah pemerintah pusat, selain itu pada level kementerian mengalami proses yang sama yaitu verifikasi berlapis.

Dalam konteks pemilu dan bencana tanah longsor lokal Lombok Utara, menunjukkan bahwa terjadi sebuah integrasi *Misattributed Blink Retrospection* dan *Negative Mindful Retrospection* dalam kasus tumbangnya petahana NADI. Kekalahan petahana NADI tidak dapat dikotomi pada satu kendala secara terpisah melainkan harus diletakkan pada satu kesatuan yang saling berdampingan. Kegagalan sistemik struktural nasional menjadi pemicu gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja operasional birokrasi pada akar rumput di bawah. Meskipun secara teoritis kajian mengenai perilaku pemilih dalam keadaan bencana, memunculkan ketegangan konseptual tetapi dapat dijelaskan melalui mekanisme atribusi lokal atau disebut sebagai *local proxy attribution*. Dalam pandangan publik tidak melakukan pemisahan secara kewenangan teknokratis maupun secara administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Runtuhnya struktur kekuasaan dinasti lokal yang bersifat sementara sebagai wujud amuk elektoral sesaat dari para pemilih yang sudah terlalu kecewa terhadap kehadiran pemerintah yang tidak dapat memberikan kepastian terhadap hidup mereka. Keruntuhan ini merupakan fenomena sosiologi politik yang tidak ditemukan pada peristiwa sebelumnya yaitu: *Misattributed Blink Retrospection* (bisa kognitif makro pemilih) dengan *Negative Mindful Retrospection* (alienasi birokrasi mikro lapangan). Penyatuan kedua arus negatif inilah menjadi katalisator utama amuk elektoral publik pasca bencana terhadap petahana NADI sehingga mengalami kekalahan.

Temuan disertasi ini justru menunjukkan hasil sebaliknya yaitu teori “*Retrospektive Multiplication effect Theory*” (Teori Efek Multiplikasi Retrospektif) ini membuktikan bahwa adanya efek platuk ganda (*dual-trigger effect*) di mana

kegagalan manajemen struktural pusat diamplifikasi secara destruktif oleh oprasional birokrasi daerah yang tidak berjalan maksimal karena berbagai kendala teknis dilapangan. Konvergensi struktural dan operasional sangat menentukan runtuhnya legitimasi petahana pada kontestasi kekuasaan pada situasi krisis meskipun hanya bersifat jangka pendek. Dinamika pemilu dan bencana menyajikan temuan secara terpisah, retrospeksi buta dan retrospeksi penuh perhatian negatif, temuan baru ini mematahkan determinasi politik klasik yang memperhitungkan pemilih memberikan penghukuman kepada kandidat petahana karena aspek bencana geologis ataupun aspek lainnya.

Keruntuhan struktur kekuasaan dinasti lokal dan berubahnya peta pengelompokan struktur sosial masyarakat di tengah dominasi keunggulan komparatif raksasa sebagai petahana pada kontestasi politik lokal Lomok Utara tidak bermakna permanen tetapi bersifat sesaat atau jangka pendek. Temuan ini menambah nilai kontribusi teoritis secara fundamental terhadap kajian mengenai efek bencana alam terhadap hasil pemilu yang dapat mengubah peta struktur dan pola dinasti politik lokal di Indonesia.

6.5 Munculnya *Political Nexus* dan ekspansi *komprehenship vulnerability* berdasarkan integrasi struktural dan agensi.

Kekalahan petahana, pasangan Najmul-Suardi terbukti disebabkan oleh tata kelola kebijakan yang tidak maksimal merupakan faktor utama pendukung kekalahan petahana pada kontestasi Lombok Utara, meskipun kewenangan diluar kendali mereka. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi (*Over Confident*) dari hasil survei beberapa lembaga justru menjadi bumerang yang menjatuhkan petahana. Sebagai peristiwa politik bagi petahana idealnya mampu dimanfaatkan sebagai

kesempatan untuk mendapatkan dukungan publik, namun justru sebaliknya menjadi batu sandungan dalam mempertahankan kekuasaan pada kontestasi. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Lombok Utara pada tahun 2020, bahwa persepsi publik berkaitan dengan kemampuan petahana dalam merespons situasi krisis menjadi variabel yang krusial yang dapat menentukan petahana mendapatkan simpati atau justru mendapatkan gelombang perlawanan dan kemarahan publik yang tidak puas akan kinerja petahana.

Petahana yang mengalami kekalahan pada kontestasi politik lokal menunjukkan bahwa *Political nexus* mengalami penguatan model antara jejaring kekuasaan politik dengan terjadinya kerentanan struktural dan agensi secara simultan. Posisi sebagai petahana seyogyanya memberikan nilai lebih dibandingkan dengan kandidat penantang yang memiliki sumber daya dukung yang terbatas, sementara petahana diuntungkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Namun, fakta berbicara lain bahwa proses distribusi penanganan bencana mulai dari masa rehab/rekon yang mengalami berbagai persoalan struktural dan operasional membuat petahana kehilangan legitimasi dan jaringan patronase yang sebelumnya terlihat kuat namun justru rapuh pada saat menjelang pemilihan.

Sebagai seorang petahana melakukan masa pemulihan pasca terjadinya bencana membutuhkan daya dukung yang maksimal karena menghadapi berbagai kerentanan yang muncul serta tidak bersifat tunggal, melainkan penyeberan lintas dimensi yang mencakup aspek secara agensi dan struktural yang saling menguatkan. Munculnya kendala struktural dari pemerintah pusat berkaitan dengan perubahan regulasi, otoritas anggaran dan kebijakan menjadikan sistem birokrasi lokal terlihat kaku dalam memberikan respons terhadap penanganan pemulihan di daerah. Aturan

maen administrasi yang dinilai rumit dan sangat prosedural dalam pencairan dana stimulan pembangunan perumahan dan bantuan jaminan sosial masyarakat berdampak pada rasa kekecewaan yang mendalam kepada pemerintah. Sebelumnya, petahana menganggap bahwa kehadiran struktur birokrasi akan menjadi mesin penggerak elektoral pada masa krisis namun justru sebaliknya menjadi beban politik elektoral petahana.

Integrasi struktur dan agensi sebagai titik balik kekalahan petahana pada Pilkada Lombok Utara 2020 merupakan wujud dari amuk elektoral yang tidak dapat dibendung dengan hanya menyajikan data keberhasilan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perumahan yang terselesaikan. Bertemunya kedua aspek struktural dan agensi dalam dinamika politik elektoral lokal justru menyulut terjadinya keretakan secara fatal pada tubuh petahana. Masyarakat Lombok Utara yang merasa kecewa terhadap petahana melampiaskan rasa prustasi kepada petahana melalui instrumen hukuman politik (*punishment*).